



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HANDINI RAHAYU**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
3. NHK : **722547**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 384.869.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/390 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 133.400.000
2. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 9.720.000
3. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 22.944.000
4. Tanah Seluas 1650 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
5. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 12.690.000
6. Tanah Seluas 2570 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 69.390.000
7. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 6.480.000
8. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
9. Tanah Seluas 455 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 12.285.000
10. Tanah Seluas 2360 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 84.960.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 202.000.000**



1. MOBIL, CHEVROLET SPIN Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	207.806.898
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	804.275.898
III. HUTANG	Rp.	79.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	725.275.898

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.